

Gratisan Lahan IKN ke 10 Negara



SUMBER : KALTIMPOST.CO.ID JUMAT, 14/02/2025

Di tengah pembahasan efisiensi anggaran pemerintah termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN), Otorita IKN mengundang sedikitnya tiga lembaga keuangan internasional. Antara lain *Asian Development Bank* (ADB), *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB), dan *Islamic Development Bank* (IsDB), Kamis (13/2).

Selain itu, di kegiatan bertajuk *Nusantara Internasional Partners Visit* (NIPV) tersebut hadir pula perwakilan dari 10 kedutaan besar (Kedubes) negara-negara seperti Australia, Inggris, Spanyol, Jepang, Singapura, Belanda, Denmark, Jerman, Finlandia, dan Norwegia. Termasuk perwakilan lembaga multilateral, akademisi, dan forum komunikasi pengusaha. Mereka diajak langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono untuk mengunjungi beberapa lokasi termasuk Istana Negara di IKN.

Dalam penyampaiannya kepada perwakilan lembaga dan Kedubes, disebutkan Basuki, jika dirinya telah mendapat mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk terus melanjutkan pembangunan IKN. Di mana saat ini telah memasuki tahap kedua dari lima tahap yang telah disusun hingga 2045. Dalam kesempatan tersebut Basuki kembali menegaskan kembali komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus melanjutkan pembangunan IKN.

"Tahap kedua pembangunan IKN terus berlanjut. Presiden Prabowo Subianto meminta saya secara langsung untuk menyelesaikan wilayah KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan), utamanya ekosistem yudikatif dan legislatif pada tahun 2028," tutur Basuki.

Dalam kegiatan yang akan berlangsung hingga hari ini (14/2), Basuki juga menyerahkan tiga dokumen untuk upaya pelestarian lingkungan di IKN yang disusun bersama dengan ADB kepada para mitra. Adapun tiga dokumen tersebut adalah "*Nusantara Reforestation Plan*", "*Environmental Status of Nusantara*", dan "*Species and Habitat Management Plan*".

"Saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Pemerintah Australia, Pemerintah Belanda, Pemerintah Spanyol, Pemerintah Inggris Raya, *Asian Development Bank* (ADB), untuk kontribusinya dalam pengembangan kota berkelanjutan di IKN," ujar Basuki dalam sambutannya.

TAWARKAN LAHAN

Dalam diskusi terbukanya kepada perwakilan Kedubes yang hadir, Basuki meyakinkan kepada perwakilan negara dan lembaga yang hadir bahwa konsep pembangunan IKN bukan hanya di atas kertas dan dari video yang ditayangkan, namun hingga implementasinya di lapangan. "Anda lihat di sana (Sentra Massa di Plaza Seremoni), itu lahan kami kupas. Namun tidak kami biarkan. Ribuan tanaman kami datangkan untuk menutup lapisannya sehingga bisa kembali hijau," ujar Basuki.

Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) era Presiden Joko Widodo itu juga menawarkan lahan gratis untuk kedutaan negara-negara sahabat. Namun dengan syarat. "Jika Anda membangun Kedutaan di IKN sebelum tahun 2028, Anda akan mendapatkan tanah tersebut secara gratis," kata Basuki kepada Duta Besar Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen.

Gerritsen pun menyambut baik tawaran Basuki tersebut. Di sisi lain dia mengungkapkan kekagumannya terhadap pembangunan IKN. "Anda telah mengerjakan pembangunan IKN dengan luar biasa. Ini sangat menakjubkan karena mengedepankan prinsip-prinsip berkelanjutan," tuturnya.

Hal serupa disampaikan salah satu perwakilan dari Kedubes Inggris Farah Chaudhry yang baru pertama kali datang ke IKN. "Terima kasih telah mengundang kami. Dan apa yang saya lihat langsung ini adalah sesuatu yang mengagumkan. Dan saya baru percaya setelah saya melihatnya secara langsung." Adapun salah satu pemimpin ADB Neeta Pokhrel menyebut, kunci kesuksesan pembangunan sebuah kota adalah pemimpinnya. "Dan menurut kami Anda (Basuki) adalah pemimpin yang luar biasa," puji Neeta.

GAET BANTUAN NEGARA BARU

Usai kegiatan di hari pertama, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Myrna Asnawati Safitri kepada awak media menyampaikan, NIVP diselenggarakan untuk memperlihatkan secara langsung progres pembangunan IKN. Sekaligus menyampaikan komitmen Otorita IKN dalam mewujudkan pembangunan IKN yang berkelanjutan yang terdiri dari pembangunan fisik dan non-fisik.

"Tentu beberapa negara ini telah banyak memberikan bantuan terutama dari sisi desain IKN dan *technical assistant* utamanya untuk menjadikan IKN sebagai kota yang berkelanjutan, kota hijau, *forest city*, dan lain-lain. Termasuk fondasi yang menjadi kebijakan khususnya terkait lingkungan hidup. Ini tentu kami sangat apresiasi," ucap Myrna.

Lanjutnya, ada 20 negara yang disebutnya sangat menyambut baik kegiatan NIVP ini. Di mana meski sudah ada sejumlah negara yang pernah memberikan bantuan, namun ada pula negara-negara yang hadir di dalamnya yang belum pernah memberikan bantuan.

"Beberapa sudah pernah membantu, ada yang sedang berjalan, dan ada yang belum. Mereka semua kami ajak untuk melihat langsung. Dan antusiasme mereka sangat tinggi dengan segala keterbatasan yang ada di IKN. Baik dari negara-negara sahabat maupun lembaga multilateral yang hadir. Kami ingin tunjukkan kepada mereka secara langsung jika pembangunan IKN terus berjalan. Karena *seeing is believing*," bebernya. **(rdh/rd)**

Sumber Berita :

1. kaltimpost.co.id, Gratiskan Lahan IKN ke 10 Negara, 14/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 (UU 3/2022) antara lain diatur sebagai berikut:
 - (1) Otorita Ibu Kota Nusantara diberikan kewenangan khusus atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara, kecuali yang oleh peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai urusan pemerintahan absolut.

- (2) Kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk antara lain kewenangan pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra Ibu Kota Nusantara.
2. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU 3/2022, pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Ibu Kota Nusantara; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

